

**SKRIPSI**

**PERAN MEDIA MASSA DALAM PENDIDIKAN POLITIK MELALUI  
SOSIALISASI POLITIK**

(Studi Kasus Pemberitaan Surat Kabar Suara NTB pada Pemilihan Gubernur Nusa  
Tenggara Barat 2018)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Strata Satu (SI) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram



**OLEH:**

**MUHAMMAD FAUZI**  
**NIM. 216130057**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PERAN MEDIA MASSA DALAM PENDIDIKAN POLITIK MELALUI  
SOSIALISASI POLITIK**

(Studi Kasus Pemberitaan Surat Kabar Suara NTB pada Pemilihan Gubernur Nusa  
Tenggara Barat 2018)



**PROGRAM STUDI  
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian skripsi  
Mataram, 12 Agustus 2020

**Dosen Pembimbing I**

**Drs. H. Darmansyah, M.Si.**  
NIDN. 0008075914

**Dosen Pembimbing II**

**Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP.**  
NIDN. 0827118801

**Mengatahui,**

**Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan**



**Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP**

NIDN. 0816057902

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**PERAN MEDIA MASSA DALAM PENDIDIKAN POLITIK MELALUI**  
**SOSIALISASI POLITIK**  
**(Studi Kasus Pemberitaan Surat Kabar Suara NTB Pada Pemilihan**  
**Gubernur Nusa Tenggara Barat 2018)**

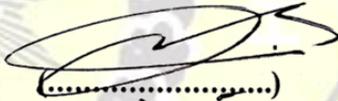
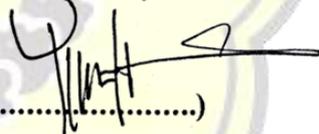
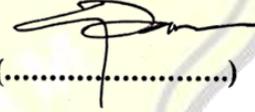


Disusun dan diajukan Oleh  
**MUHAMMAD FAUZI**  
NIM. 216130057

**PROGRAM STUDI**  
**ILMU PEMERINTAHAN**

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal: 18 Agustus 2020 dan  
dinyatakan memenuhi syarat kelulusan

**Tim Penguji**

1. **Drs. H. Darmansyah, M.Si** (PU)   
NIDN. 0008075914
2. **Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP** (PP)   
NIDN. 0827118801
3. **Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.IP** (PN)   
NIDN. 0825038303

**Mengatahui,**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Muhammadiyah Mataram**

**Dekan,**



**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
NIDN. 0806066801

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa :

Nama : Muhammad Fauzi

Nim : 216130057

Alamat : Dusun Batu Bintang, RT. 014 RW. 07 Desa Air Suning Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat

Memang benar skripsi yang berjudul Peran Media Massa Dalam Pendidikan Politik Melalui Sosialisasi Politik (Studi Kasus Pemberitaan Surat Kabar Suara NTB Pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat 2018) adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik ditempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain. Kecuali arahan pembimbing jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang dijadikan acuan sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya tidak beajar saya siap mempertanggung jawabkannya. Termasuk bersedia meninggalkan gelar sarjana yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 18 Agustus 2020  
Yang membuat pernyataan



Muhammad Fauzi  
NIM. 216130057



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fauri  
NIM : 216130057  
Tempat/Tgl Lahir : Seteluk, 20 Desember 1997  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Fle/pol  
No. Hp/Email : 085 205 205 167  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran media massa dalam Demokrasi Politik melalui Sosialisasi Politik (Studi kasus Pemberitaan Surat Kabar Suara NTB Pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat 2018)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram  
Pada tanggal : 26/08/2020

Penulis



Muhammad Fauri  
NIM. 216130057

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

*“Salah Satu Pengkerdilan Terkejam Dalam Hidup Adalah Membiarkan  
Pikiran Yang Cemerlang Menjadi Budak Bagi Tubuh Yang Malas, Yang  
Mendahulukan Istirahat Sebelum Lelah”*

**(Buya Hamka)**

*“Tidak Selamanya Kamu Harus Berteriak Keras Untuk Didengar Oleh Orang  
Lain, Kadang Cukup Dengan Sebuah Tulisan Sederhana Membuat Kamu  
Mampu Mengutarakan Isi Hati”*



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Sujud syukur kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Tinggi atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi yang sederhana ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal dalam mencapai cita-cita Karya sederhana ini dipersembahkan kepada orang yang sangat berarti dan kusayangi yaitu :

1. Ibudan Ayah yang senantiasa berdo'a untuk keberhasilan dan kesuksesanku
2. Adinda Rifki yang selalu menyemangati dan menanyakan kapan wisuda
3. Teruntuk Keluarga, Karabat dan Sahabat yang selalu berkontribusi dalam memberikan dukungan iksan, rio, toni, dani, sumargo, alan dan alan budiman
4. Kepada Silfiah Miulandari yang selalu menemani dan menyemangati selama ini

Semoga dengan Skripsi ini bisa menjadi motivasi juga buat teman – teman yang sedang berjuang menyelesaikan penelitiannya agar segera menyul

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga akhirnyaskripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya.

Skripsi yang diberi judul **“PERAN MEDIA MASSA DALAM PENDIDIKAN POLITIK MELALUI SOSIALISASI POLITIK SUARA NTB (Studi Kasus Pemberitaan Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat 2018)”** dimana merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana srata satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr.H.Arsyad Abd Ghani, M.Pd sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr.H. Muhammad Ali, M.Si sebagai Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
4. Bapak Drs. H. Darmansyah, M.Si sebagai Pembimbing 1 dan Bapak Yudhi Lestanata, S.IP.,M.IP sebagai Pembimbing 2

5. Bapak dan ibu dosen yang telah membekali ilmu pengetahuan selama kuliah
6. Bapak H. Agus Talino selaku Pimpinan Kantor Harian Umum Suara NTB dan para wartawan bidang politik di Suara NTB
7. Kerabat Serta Sahabat Seperjuangan yang senantiasa saling mendukung sampai detik ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan dan keridhaan-Nya. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun penulis harapkan untuk kemajuan masa mendatang. Akhir kata penulis harapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkompeten. Aamiin

Penulis

Muhammad Fauzi  
216130057

Muhammad Fauzi. 2020. **Peran Media Massa Dalam Pendidikan Politik Melalui Sosialisasi Politik Surat Kabar Suara NTB (Studi Kasus Pemberitaan Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat 2018)**.Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.  
**Pembimbing I : Drs. H. Darmansyah, M.Si**  
**Pembimbing II : Yudhi Lestanata, S.IP.,M.IP**

#### ABSTRAK

Media massa menduduki posisi yang sangat setrategis dalam memberi akses informasi pada pemilihan Gubernur NTB tahun 2018. Berita yang dikemas sangat menarik perhatian masyarakat sehingga surat kabar Suara NTB dapat menjadi agen sosialisasi yang berperan dalam memberikan informasi politik terkait pemilihan. Penelitian ini menggambarkan bagaimana peran surat kabar Suara NTB dalam sosialisasi politik pada pemilihan Gubernur NTB tahun 2018

Metode penelitian adalah kualitatif melalui pendekatan diskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, sumber data terdiri dari data primer dan sekunder dengan teknik analisis melalui reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, peran Suara NTB dalam sosialisasi politik pada Pemilihan Gubernur NTB 2018 yaitu (1) penyedia informasi politik yang berupa pemberitaan seputar pemilihan, dengan sasaran pemberitaan berupa Politikus, pengusaha dan instansi pendidikan dan persebaran keseluruhan Kabupaten/Kota di NTB (2) meningkatkan Pengatahuan politik pembaca surat kabar Suara NTB. dan kedua Faktor yang mempengaruhi sosialisasi politik (1) suara NTB sebagai Agen sosialisasi politik yang memberikan informasi politik dengan menggunakan dua cara yaitu surat kabar dengan *E-Paper*(2) Mekanisme penerapan sosialisasi politik sebagai faktor pendukung dan penghambat sosialisasi politik berupa penerapan Imatasi sebagai pembentuk opini pembaca dan pemberian Motivasi ke pembaca berupa iklan layanan masyarakat dari KPU dan narasi keberhasilan dalam Pemilihan untuk menjaga partisipasi pembaca dalam pemilihan selanjutnya.

**Kata kunci : Media Massa, Sosialisasi Politik, Surat Kabar, Pemilihan Gubernur.**

Muhammad Fauzi. 2020. *The Role of Mass Media in Political Education through Political Socialization of the Suara NTB Newspaper (A Case Study at West Nusa Tenggara Governor Election 2018)*. A Thesis. Mataram: Muhammadiyah University of Mataram.

S

Consultant I: Drs. H. Darmansyah, M.Si

Consultant II: Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP

#### ABSTRACT

*The mass media occupies a strategic position in providing access to information on the Election of the NTB Governor in 2018. The packaged news attracted public attention; as a result, the Suara NTB newspaper could become a socialization agent that played a role in providing political information related to the Election. This research described the role of the Suara NTB newspaper in political socialization in the Election of NTB Governor in 2018.*

*The research method used was descriptive through a qualitative approach with data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The data sources consisted of primary and secondary data, then analyzed through data reduction, data display, and drawing conclusions.*

*The results show that the role of the Suara of NTB in political socialization in the 2018 NTB Governor Election were (1) providing political information in the form of news about the Election, with the target of news were politicians, businessmen and educational institutions and the distribution to all districts / cities in NTB (2) increase the readers political knowledge of the Suara NTB newspaper. Moreover, two factors that influence political socialization are (1) the Suara NTB as a political socialization agent that provides political information using two ways, namely newspapers and E-Paper (2) Mechanisms for implementing political socialization as a supporting and inhibiting factor for political socialization in the form of Imitation as a shaping agent of reader's opinion and giving motivation to readers in the form of public service advertisements from the KPU and the narrative of success in the Election to maintain reader participation in the next Election.*

**Keywords: Mass Media, Political Socialization, Newspapers, Governor Election**

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM

An KEPALA  
LABORATORIUM BAHASA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Moh. Fauzi Hafidul M.Pd

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	7
2.2 Landasan Teori .....	18
2.2.1 Peran .....	18
2.2.2 Media Massa .....	23
2.2.3 Kajian Umum Pers .....	27
2.2.4 Definisi Surat Kabar .....	37

2.2.5 Sosialisasi Politik.....	43
2.2.6 Definisi Pendidikan Politik .....	50
2.2.7 Pemilihan Umum.....	52
2.2.8 Kerangka Berpikir .....	56

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	60
3.2 Lokasi Penelitian.....	61
3.3 Fokus Penelitian.....	61
3.4 Informan Penelitian .....	61
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	62
3.6 Sumber Data.....	63
3.7 Teknik Analisis Data .....	64

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Profil Harian Umum Suara NTB .....	67
4.1.1 Sejarah Harian Umum Suara NTB .....	67
4.1.2 Struktur Organisasi PT.Suara NTB PERS .....	69
4.1.3 Visi Misi Harian Umum Suara NTB .....	71
4.2 Hasil dan Pembahasan.....	73
4.2.1 Peran Media Massa Dalam Pendidikan Politik Melalui Sosialisasi Politok Suara NTB .....	73
4.2.1.1 Informasi Politik .....	73
4.2.1.2 Pengetahuan Politik .....	83
4.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Sosialisasi .....	89

4.2.2.1 Agen Sosialisasi Politik .....	89
4.2.2.2 Mekanisme Sosialisasi .....	94

## **BAB V KESIMPULAN**

5.1 Kesimpulan .....	104
5.2 Saran.....	106

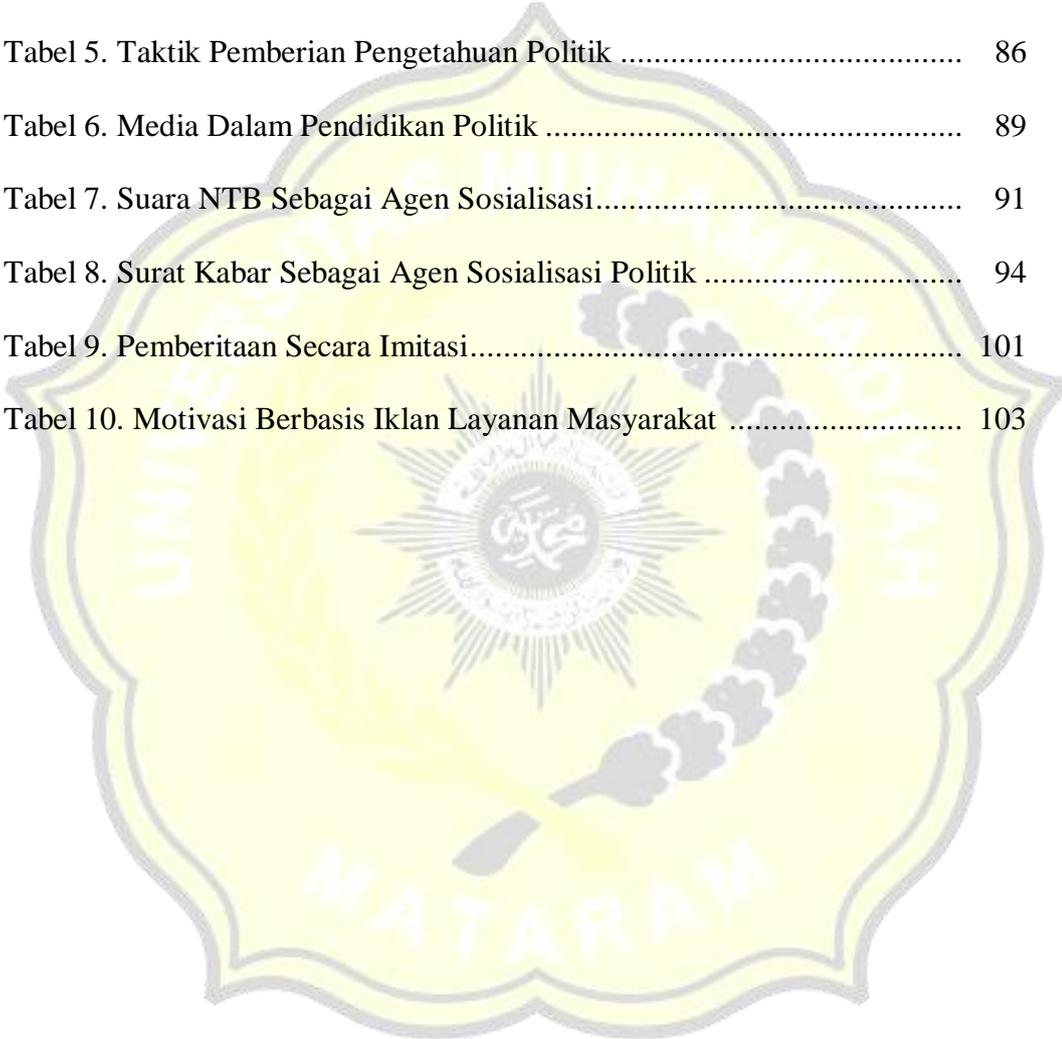
## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Table 1. Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 2. Informasi Politik Melalui Pemberitaan Politik .....	76
Tabel 3. Target Pembaca Surat Kabar .....	80
Tabel 4. Jangkauan dan Sebaran.....	83
Tabel 5. Taktik Pemberian Pengetahuan Politik .....	86
Tabel 6. Media Dalam Pendidikan Politik .....	89
Tabel 7. Suara NTB Sebagai Agen Sosialisasi.....	91
Tabel 8. Surat Kabar Sebagai Agen Sosialisasi Politik .....	94
Tabel 9. Pemberitaan Secara Imitasi.....	101
Tabel 10. Motivasi Berbasis Iklan Layanan Masyarakat .....	103



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara demokrasi adalah Negara yang mengikutsertakan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, menjamin terpenuhinya hak dasar rakyat dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. Demokrasi dalam bidang politik, menekankan pentingnya partisipasi warganegara dalam kehidupan politik, mengingat demokrasi menempatkan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. sesuai dengan asas demokrasi yang mengikut sertakan rakyat dalam pemerintahan. Salah satu hak dasar rakyat yang harus dijamin adalah kemerdekaan menyampaikan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan. Media memiliki peran signifikan dalam hal literasi bagi masyarakat, secara khusus media dapat menjadi saluran penyebar informasi publik, hak – hak sipil dan pembentukan nilai demokrasi. Media juga memainkan peran penting dalam menjembatani perbedaan. Kehadiran media sebagai sarana informasi kepada masyarakat dapat memberikan pemahaman melalui konten yang mencerahkan dan mendidik (<http://kominfo.go.id/siaran> pers tanggal 6 Maret 2020 jam 1:20 AM WIB)

Dalam hal ini Pres memiliki peran untuk mencari dan menyampaikan informasi, sesuai pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, bahwa Pers Nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;

- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. Mengembangkan Pendapat Umum berdasarkan informasi umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. Melakukan pengawasan kritik, koreksi dan saran terhadap hal – hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

Melihat hal ini, media massa menduduki posisi yang sangat strategis dalam memberi akses bagi mereka yang membutuhkan informasi. Sesuai sifat kodrat manusia yakni rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu, kehadiran media massa dianggap dapat membantu manusia dalam memberi akses bagi orang – orang untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Menurut Cangara (2003) media massa adalah alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis, seperti surat kabar, radio, televisi, film dan sebagainya.

Berita yang dikemas mengenai perilaku pemerintah ataupun partai politik banyak mempengaruhi masyarakat. Tujuan sosialisasi politik melalui sarana ini yaitu media massa mampu menyita perhatian individu dan memperluas wawasan terhadap masalah-masalah politik yang berkembang. Media pemberitaan dituntut untuk dapat menjaga netralitas, berimbang dalam pemberitaan karena merupakan sumber utama yang diperoleh oleh masyarakat. Terutama dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang wakil rakyat.

Adapun Pemilihan umum Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018 tentunya sangat menarik perhatian masyarakat karena merupakan ajang untuk memilih pemimpin yang akan membawa NTB kedepannya. Mewujudkan Pemilu yang berkualitas, yaitu pemilu yang lebih demokratis, jujur dan adil, yang dapat menghasilkan wakil – wakil rakyat yang mau berkerja keras, dengan mengutamakan kepentingan rakyat dari pada kepentingan pribadi dan golongan, tidak hanya cukup dalam meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengwasan dan evaluasi serta meningkatkan fropesionalitas dan kualitas dari penyelenggara pemilu, tetapi harus memperbaiki sistem pemilu itu sendiri, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk menggunakan hak miliknya dengan langsung, umum, bebas, dan rahasia, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan suatu kebutuhan untuk mengoreksi terjadinya penyimpangan penerapan otonomi daerah yang ditunjukan para elit di tingkat lokal. Asumsi bahwa otonomi daerah akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik (Abdullah,2009:147).

Dalam hal ini media surat kabar yang ada di NTB dapat memberi informasi program - program para kandidat, dan mensosialisasikan seputar peristiwa yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub), sehingga masyarakat mempunyai penilaiannya sendiri terhadap calon pemimpin agar masyarakat tidak salah pilih dalam memilih pemimpinnya. Terkait hal tersebut, Surat kabar lokal yang berada di Nusa Tenggara Barat yaitu Suara NTB atau bisa di sebut dengan harian Suara NTB merupakan surat kabar Indonesia yang terbit di provinsi Nusa Tenggara

Barat. Surat kabar yang memiliki *tagline* “Pengembangan Pengamal Pancasila” harian ini lahir dari sebuah rubrik khusus berisi berita - berita seputar Provinsi NTB di Bali Post. Surat kabar Suara NTB merupakan surat kabar yang mendapatkan banyak apresiasi dari masyarakat dan terbilang mengalami kemajuan, itu terbukti dari tahun 2004 yang mengalami penambahan halaman secara gradual dan pada tahun 2013 Suara NTB telah terbit dengan 16 halaman. Adapun bentuk bentuk pemberitaan seputar Pilgub 2018 yang diterbitkan Surat Kabar Suara NTB dengan Edisi 30 Oktober 2017 yaitu Hidline: “Tahapan Pilkada NTB 2018 di Mulai”, Edisi Selasa 13 Februari 2018 Hidline: “KPU Tetapkan Empat Pasangan Calon Gubernur dan Wagub NTB”, dan edisi 28 Juni 2018 Hidline: “Hasil Hitung Cepat Pilkada NTB, Zul-Rohmi Unggul”(www.suarantb.com tanggal 23 Januari 2020 jam 1:20 AM WIB).

Berdasarkan uraian diatas tulisan ini akan membahas bagaimana peran media massa khususnya media cetak Suara NTB dalam memberitakan peristiwa politik dalam terbitannya, atas dasar tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERAN MEDIA MASSA DALAM PENDIDIKAN POLITIK MELALUI SOSIALISASI POLITIK SURAT KABAR SUARA NTB (Studi Kasus Pemberitaan Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat 2018)”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Fokus permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana peran media massa dalam pendidikan politik khususnya oleh surat kabar Suara NTB dalam pemberitaan Pilgub NTB tahun 2018 yang telah di selenggarakan. Berkaitan dengan hal itu maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Surat Kabar Suara NTB dalam Sosialisasi Politik pada Pemilihan Gubernur NTB 2018
2. Apakah Faktor yang Mempengaruhi Surat Kabar Suara NTB dalam melakukan Sosialisasi Politik pada Pemilihan Gubernur NTB 2018

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak di capai dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Peran Media massa dalam pendidikan Politik Melalui Sosialisasi Politik (Studi Kasus Pemberitaan Surat Kabar Suara NTB pada pemilihan Gubernur NTB 20
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi surat kabar Suara NTB dalam memberitakan sosialisasi politik pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat 2018.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a. Secara Teoritis**

hasil penelitian mengkaji atau memberikan penjelasan tentang peran surat kabar dalam pendidikan politik terutama dalam sosialisasi politik yang dilakukan oleh media massa

### **b. Kegunaan Praktis**

1. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan yang berkaitan tentang pendidikan Politik
2. hasil penelitian di harapkan bisa menjadi acuan untuk penelitian yang berkaitan dengan pendidikan politik selanjutnya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian tentang Peran Media Massa Dalam Pendidikan Politik pernah dilakukan oleh Tiffany W M Ticoalu pada tahun 2015 dengan Judul *Pemberdayaan Media Massa Dalam Meningkatkan Pendidikan Politik Pada Masyarakat Kelurahan Wewelen Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa.*

Dalam penelitian ini Tiffany W M Ticoalu ingin mengetahui bagaimana pemberdayaan media massa dalam meningkatkan pendidikan politik pada masyarakat Kelurahan Wewelen Kabupaten Minahasa dan untuk mengetahui media massa yang dominan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Responden penelitian penelitian ditentukan sebanyak 10, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa media massa khususnya televise belum sepenuhnya menjalankan fungsi sebagai sarana pendidikan politik. Lebih banyak menampilkan aspek hiburan dan komersial. Dengan kata lain media massa kurang berdaya dalam upaya meningkatkan pendidikan politik masyarakat. Kesimpulan berikutnya adalah bahwa responden lebih menyukai siaran – siaran

televisi yang di tampilkan oleh Metro TV dan TV One sebagai sumber informasi berkaitan dengan ekonomi, hukum, dan politik. Tiffany (2015) *Pemberdayaan Media Massa Dalam Meningkatkan Pendidikan Politik Pada Masyarakat Kelurahan Wewelen Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa*. Vol.5 No.3, 24

Penelitian tentang media massa terhadap pendidikan politik juga dilakukan oleh Stifly. R. Mananoma yang berjudul “*Peran Media Elektronik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Yang Ada Di Kelurahan Ondong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Sitaro*”. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai peran media massa khususnya media elektronik dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat bagi masyarakat yang ada di Kelurahan Ondong, Kecamatan Siau Barat Kabupaten Sitaro. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran mengenai data hasil penelitian yang menggunakan jenis kualitatif.

Dari hasil penelitian didapati media elektronik menjadi sarana mendidik masyarakat kelurahan Ondong untuk lebih berpartisipasi dalam aktivitas politik pemerintahan. di Kelurahan Ondong Kecamatan Ondong, menyatakan bahwa pendidikan politik yang diberikan cukup baik melalui media massa. Mananoma (2014) *Peran Media Elektronik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Yang Ada Di Kelurahan Ondong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Sitaro*. Vol.3.No.5, 54

Penelitian oleh Hardani Hasanuddin dkk berjudul “*Peran Media Massa Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilihan Pemula pada Pilkada 2013 Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif dengan menguraikan dengan menguraikan serta menginterpretasikan

data yang diperoleh dari proses mengorganisasikan dan mengurutkan data yang diperoleh dari lapangan dan dari para informan yang berjumlah 18 orang kedalam pola, katagori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja.

Dari penelitian tersebut diperoleh media massa merupakan salah satu factor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih pada suatu pemilihan kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti termotivasi untuk membuktikan bahwa media massa mempunyai peran penting dalam peningkatan partisipasi pemula pada pemilihan kepala daerah 2013 di Kecamatan Tempe Kabupaten Wojo. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh media massa terhadap peningkatan partisipasi pemilih pertama pada pilkada 2013 di Kecamatan Tempe Kabupaten Wojo. Peningkatan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor informasi. Hasanuddin (2015) *Peran Media Massa Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilihan Pemula pada Pilkada 2013 Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Peran Media Massa Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilihan Pemula pada Pilkada 2013 Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*, Vol.5 No.1, 37

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Diah Novianasari dan Samsuri berjudul “*Peran Media Massa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Para Aktivis HMP PKn di Yogyakarta*” menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan pendekatan nutralistik, sebab kondisi nyatdimpua yang terjadi dilapangan merupakan data yang paling bisa diterima.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Peran media massa baik dari sumber informasi maupun sebagai sarana partisipasi politik dalam meningkatkan

partisipasi politik telah mampu ditunjukkan oleh para aktivis HMP PKn di Yogyakarta. Media internet menjadi media massa yang paling dominan digunakan sebagai sumber informasi maupun sebagai sarana partisipasi politik oleh para aktivis HMP PKn di Yogyakarta. Peran media massa sebagai sumber informasi lebih dominan dibanding peran media massa sebagai sarana partisipasi politik, sebab peran media massa sebagai sumber informasi dapat ditunjukkan oleh para aktivis HMP PKn di Yogyakarta tanpa hambatan. Hal ini beda dengan peran media massa sebagai sarana partisipasi politik yang dinilai kurang maksimal karena masih mengalami beberapa hambatan. Peran media massa baik sebagai sumber informasi maupun sebagai sarana partisipasi politik dapat digolongkan dalam tipe gerakan moral dan tipe budaya politik partisipan. Novianasari (2016) *Peran Media Massa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Para Aktivis HMP PKn di Yogyakarta*, Vol.13, No.2, 13

Penelitian oleh Dhanarseto berjudul “Pemberitaan Media Cetak dalam Kampanye Pemilu Presiden tahun 2009 Studi Analisis Isi Pemberitaan Pemilu Presiden pada massa kampanye di media Cetak harian Jogja. Radar Jogja dan Kedaulatan Rakyat Jogja Edisi Juni – Juli 2009”. Penelitian ini menggunakan Deskriptif – Kuantitatif, data yang di peroleh adalah data yang bersifat kuantitatif dengan teknik analisis Kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan hasil pengkodean dan melakukan wawancara mendalam berdasarkan hasil analisis yang diperoleh.

Hasil yang diperoleh Berdasarkan hasil pemetaan terhadap kebijakan redaksi dalam memuat pemberitaan kampanye Pilpres yang dilakukan oleh ketiga media dapat dilihat dari sudut pandang politik, ekonomi, dan budaya maka di dapatkan hasil bahwa secara politik, ekonomi, dan budaya surat kabar kedaulatan rakyat cenderung melakukan pola pemberitaan yang memihak kepada salah satu calon Presiden incumbent yaitu pasangan calon no. 2 SBY- Boediono terkait dengan kedekatan politik antara wartawan dengan tim sukses calon, logistik ekonomi dan unsur budaya lokal yang mengikuti setiap materi kampanye yang disajikan. Sedangkan pada surat kabar radar jogja, sudut pandang ekonomi menjadi sebuah strategi dalam pengelolaan manajemen dan budaya perusahaan, sehingga sedikit banyak hal tersebut berpengaruh pada pola pemberitaan redaksi dan akhir membuat posisi politis radar jogja menjadi sedikit terhambat khususnya dalam hal pemberitaan kampanye calon presiden lalu. Pada surat kabar Harian Jogja, sudut pandang budaya terasa lebih kental dalam setiap kebijakan pemberitaan yang dikeluarkan redaksi. Pola pemberitaan yang berimbang antara ketiga calon, porsi yang merata menjadikan surat kabar ini sebagai salah satunya surat kabar yang bisa dikatakan memiliki netralitas dalam pemberitaannya.

*Dhanurseto (2010) Pemberitaan Media Cetak dalam Kempanye Pemilu Presiden tahun 2009 Studi Analisis Isi Pemberitaan Pemilu Presiden pada massa kempanye di media Cetak harian Jogja. Radar Jogja dan Kedaulatan Rakyat Jogja Edisi Juni – Juli 2009, Vol. 4 No.2, 54*

Penelitian oleh Nani Kurniasari dan Gilang Gusti Aji “Kepemilikan dan Bingkai Media analisis Framing Pemberitaan Joko Widodo sebagai Kandidat Calon Presiden Pada Koran Sindo”. Dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimanakah analisis *farming* tentang pemberitaan Jokowi yang di buat oleh Koran Sindo pada massa kampanye terbuka pilpres 2014. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif melalui telaah teks dalam Koran Sindo. Dan memiliki kesimpulan mengambik objek penelitian Koran Sindo yang berada dalam Grup MNC milik Heri Tanoesoedibjo, penelitian ini menunjukkan bahwa ada upaya pembingkaiian berita tentang sosok Joko Widodo secara negatife. Pembingkaiian yang dilakukan Koran Sindo mengisyaratkan agenda tersembunyi di balik teks berita yang disampaikan media. Seakan mendukung riset terdahulu, penelitian ini membuktikan bahwa isi media bukanlah sebuah cermin dari realitas yang sebenarnya, tetapi dibentuk oleh berbagai faktor yang menghasilkan berbagai versi yang berbeda dari realitas. Ada faktor kepemilikan yang memberikan pengaruh pada agenda penyusunan teks berita, Kurniasari (2015) *Kepemilikan dan Bingkai Media analisis Framing Pemberitaan Joko Widodo sebagai Kandidat Calon Presiden Pada Koran Sindo*, Vol.6 No.1, 97

**Tabel 1. Penelitian terdahulu**

No	Penulis	Judul	Hasil/Kesimpulan	Relevansi Penelitian	Critical Point
1	<b>Tiffany W M Ticoalu (2015)</b> Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan	Pemberdayaan Media Massa Dalam Meningkatkan Pendidikan Politik Pada Masyarakat Kelurahan Wewelen Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa	Media massa khususnya televisi belum sepenuhnya menjalankan fungsi sebagai sarana pendidikan politik. Lebih banyak menampilkan aspek hiburan dan komersial. Dengan kata lain media massa kurang berdaya dalam upaya meningkatkan pendidikan politik masyarakat. Kesimpulan berikutnya adalah bahwa responden lebih menyukai siaran – siaran televisi yang di tampilkan oleh Metro TV dan TV One sebagai sumber informasi berkaitan dengan ekonomi, hukum, dan politik	Relevansi Penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama – sama membahas tentang media massa sebagai sarana pendidikan politik	Tidak adanya kesimpulan umum mengenai yang berperan dalam meningkatkan pendidikan politik pada masyarakat

NO	Penulis	Judul	Hasil/Kesimpulan	Relevansi Penelitian	Ceitical Point
2	<b>Stifly. R. Mananoma (2014)</b> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT	Peran media elektronik dalam Pendidikan Politik Masyarakat yang ada di Kelurahan Ondong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Sitaro	media elektronik menjadi sarana mendidik masyarakat Kelurahan Ondong untuk lebih berpartisipasi dalam aktivitas politik pemerintahan. di Kelurahan Ondong Kecamatan Ondong, menyatakan bahwa pendidikan politik yang diberikan cukup baik melalui media massa	Relevansi Penelitian ini dengan penulis adalah Peran Media elektronik yang dimana sebagai media massa juga, sama – sama membahas tentang peran media sebagai pendidikan Politik	Kurangnya penjelasan mengenai peran media Elektronik seperti apa yang di gunakan dalam menyatakan pendidikan di masyarakat

No	Penulis	Judul	Hasil/Kesimpulan	Relevansi Penelitian	Critical Point
3	<b>Hasanuddin dkk. (2015)</b> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makasar	Peran Media Massa Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilihan Pemula pada Pilkada 2013 Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo	media massa merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih pada suatu pemilihan kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti termotivasi untuk membuktikan bahwa media massa mempunyai peran penting dalam peningkatan partisipasi pemula pada pemilihan kepala daerah 2013 di Kecamatan Tempe Kabupaten Wojo. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh media massa terhadap peningkatan partisipasi pemilih pertama pada pilkada 2013 di Kecamatan Tempe Kabupaten Wojo.	Relevansi penelitian ini dengan penulis adalah sama – sama menggunakan Media Massa sebagai sarana dalam memberikan pendidikan Politik	Tidak ada kesimpulan umum mengenai media jenis apa yang lebih berperan dalam meningkatkan partisipasi dalam masyarakat

No	Penulis	Judul	Hasil/Kesimpulan	Relevansi Penelitian	Critical Point
4	<b>Diah Novianasari. (2016)</b> Jurusan pendidikan IPS Program PascaSerjana, Universitas Negeri Yogyakarta	Peran Media Massa dalam meningkatkan Partisipasi Politik Para Aktivis HMP PKn di Yogyakarta	Peran media massa sebagai sumber informasi lebih dominan dibanding peran media massa sebagai sarana partisipasi politik, sebab peran media massa sebagai sumber informasi dapat ditunjukkan oleh para aktivis HMP PKn di Yogyakarta tanpa hambatan. Hal ini beda dengan peran media massa sebagai sarana partisipasi politik yang dinilai kurang maksimal karena masih mengalami beberapa hambatan. Peran media massa baik sebagai sumber informasi maupun sebagai sarana partisipasi politik dapat digolongkan dalam tipe gerakan moral dan tipe budaya politik partisipan	Relevansi penelitian ini dengan Penulis adalah sama – sama meneliti Peran media massa dalam pendidikan politik tetapi dalam penelitian ini menggunakan Partisipasi politik	Kurangnya kesimpulan dalam membahas hambatan media massa dalam meningkatkan partisipasi politik paska HMP PKn di Yogyakarta

No	Penulis	Judul	Hasil/Kesimpulan	Relevansi Penelitian	Critical Point
5	<b>Dhanarseto.</b> <b>(2010)</b> Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP-UNIB	Pemberitaan Media Cetak dalam Kampanye Pemilu Presiden Tahun 2009, studi analisis isi pemberitaan pemilu presiden pada massa kampanye di media cetak harian Jogja, Radar Jogja dan Kedaulatan Rakyat Jogja Edisi Juni – Juli 2009	Hasil yang diperoleh Berdasarkan hasil pemetaan terhadap kebijakan redaksi dalam memuat pemberitaan kampanye Pilpres yang dilakukan oleh ketiga media dapat dilihat dari sudut pandang politik, ekonomi, dan budaya maka di dapatkan hasil bahwa secara politik, ekonomi, dan budaya surat kabar kedaulatan rakyat cenderung melakukan pola pemberitaan yang memihak kepada salah satu calon Presiden incumbent yaitu pasangan calon no. 2 SBY- Boediono.	Relevansi Penelitian ini dengan Penulis sama – sama meneliti tentang media cetak sebagai objek pemberitaan	Kurangnya kesimpulan dalam menjelaskan isi berita yang bermuatan mendukung salah satu pasangan calon yang telah diterbitkan.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Peran**

#### **2.2.1.1 Definisi Peran**

Riyadi (2002:138) berpendapat peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntuan yang diberikan secara struktural (norma – norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dan terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan pendukung fungsinya dalam mengorganisasi.

Adapun Soerjono Soekanto (2002:243) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran dapat diartikan suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Sutarto dalam Lantaeda dkk (2016:2) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari 3 komponen, yaitu:

#### **a. Konsepsi Peran**

Yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.

b. Harapan peran

Merupakan harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.

c. Pelaksanaan Peran

Yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka peran akan terjalin secara kesinambungan dalam kelancarannya.

Adapun jenis – jenis peran berdasarkan pelaksanaannya seperti yang dikemukakan Nurwako dan Suyanto (2014:106) bahwa terdapat macam – macam peran berdasarkan pelaksanaan peran. Adapun jenis peran menurutnya yaitu:

a. Peran yang diharapkan (*expected roler*)

Adalah suatu peran seseorang yang diharapkan dilaksanakan secara cermat yang tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan sesuai yang ditentukan.

b. Peran yang disesuaikan (*actual roler*)

Adalah suatu peran yang dilaksanakan berdasarkan kesesuaian akan situasi dan keadaan tertentu.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan teori yang berbicara tentang posisi perilaku seseorang yang diharapkan tidak berdiri sendiri melainkan selalu ada dengan kaitannya dengan adanya orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran dapat dipercaya dan menjadi harapan orang lain dalam menjalankan perannya agar tidak menyimpang dari perannya dalam masyarakat.

### 2.2.1.2 Aspek – aspek Peran

Biddle dan Thomas dalam (Surlito. 2015:215) berpendapat dalam teori

Peran:

1. Orang – orang yang mengambil bagian dalam peran

Orang – orang yang mengambil bagian dalam peran dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:

- a. *Actor* (pelaku), yaitu orang yang sedang berperilaku menuruti suatu peran tertentu
- b. Target (Sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan prilakunya.

2. Perilaku yang muncul dalam peran

Prilaku yang muncul dalam indikator tentang prilaku sebagai berikut:

- a. Harapan tentang peran (*Expectation*)

Harapan tentang peran adalah harapan – harapan orang lain tentang prilaku pantas, yang harusnya di tunjukan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.

- b. Norma (*norm*)

1. Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*), harapan tentang sesuatu yang akan terjadi,
2. Harapan normatife (*role expectation*), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran.

c. Wujud perilaku dalam peran (*performance*)

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda – beda dari suatu aktor ke aktor lain

d. Penilaian (*evaluation*) dan Sanksi (*sanction*)

Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negative yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor.

3. Kedudukan orang – orang dalam perilaku

Kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersama – sama (kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok – kelompok yang lain berdasarkan sifat – sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama – sama mereka perbuat, dan reaksi orang – orang lain terhadap mereka.

4. Kaitan antara orang dan perilaku

Kaitan orang dengan perilaku kaitan antara orang dengan orang dalam teori peran ini tidak banyak dibicarakan. Kriteria untuk menetapkan kaitan – kaitan tersebut di atas diantaranya yaitu:

- a. Kriteria kesamaan
- b. Derajat saling ketergantungan
- c. Gabungan antara derajat kesamaan dan saling ketergantungan

Adapun dimensi peran yang dikemukakan Arimbi Horoepoetri (2003:19) sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan
2. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini berpendapat bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan kedudukan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapat masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasakan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan dan responsible.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapatmeningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan Setiap orang mempunyai perannya masing – masing dalam kehidupannya sesuai dengan pola dan lingkungan hidupnya.Hal ini berarti bahwa peranan menentukan terhadap perbuatan bagi seseorang. Pentingnya peran adalah dengan adanya peran yang diperoleh dari

kedudukan akan bisa menentukan dan mengatur perilaku masyarakat atau orang lain.

### **2.2.2 Media Massa**

Media adalah tempat dimana proses komunikasi itu berlangsung, dengan demikian media massa merupakan sarana penyampaian komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas pula. Sedangkan informasi massa merupakan informasi yang di peruntukan kepada masyarakat secara massal, bukan ditunjukkan kepada individu masing – masing. (Tamburaka,2010:14)

Bungin (2006:72) berpedapat media massa diartikan sebagai media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara masal dan dapat diakses oleh masyarakat banyak, ditinjau dari segi makna, media massa merupakan alat atau sarana untuk menyebarluaskan isi berita, opini, komentar, hiburan, dan lain sebagainya. Adapun Cangara menyatakan, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi (Cangara, 2010:123).

Definisi diatas menjelaskan melalui media massa dapat menyampaikan pesan dari komikator kepada khalayak baik berupa hiburan, politik dan sebagaiannya, media yang bersifat luas dalam menyampaaikan pesan secara cepat kepada masyarakat yang berupa alat – alat seperti radio surat kabar dan sebagaiannya.

Tamburaka (2013:41) menyatakan suatu media dikatakan sebagai media massa mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian informasi.
2. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima.
3. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, dimana informasi yang disampaikan akan diterima oleh orang banyak pada saat yang bersama.
4. Bersifat terbuka, artinya pesan dapat diterima oleh siapa saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin dan suku bangsa.

Perkembangan teknologi saat ini juga sangat mempengaruhi peran media massa, kebebasan media massa dan dukungan dari teknologi tersebut dapat menghadirkan dua kondisi, satu sisi akses informasi yang semakin mudah untuk masyarakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya akan menciptakan kondisi yang demokratis, namun di sisi lainnya adalah kebebasan yang dimaksud tidak diiringi dengan tanggung jawab akan menimbulkan kebebasan yang tidak terarah. Teknologi memfasilitasi proses keterhubungan dalam skala yang lebih besar. Fenomena ini meningkat keterkaitan ekonomi, politik, masyarakat dan budaya dianggap sebagai globalisasi. Media disajikan sebagai alat untuk mempercepat

proses ini dan menghilangkan batas. perubahan-perubahan yang terjadi pada media akan selalu disertai oleh perubahan pada masyarakatnya (Habibie,2018:79).

Kemampuan media massa sebagai pemberi pesan kepada khalayak tentunya ikut berperan sebagai pengiring opini di tengah masyarakat itu sendiri adapun fungsi media massa yang di jelaskan oleh Mc Quild dalam (Nuradin,2004) mengemukakan arti penting dari media massa sebagai berikut:

1. Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja, barang, dan jasa serta menghidupkan industri lain yang terkait
2. Media juga merupakan industri tersendiri yang memiliki peraturan dan norma-norma yang menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya.
3. Media merupakan sumber kekuatan karena dapat digunakan sebagai alat kontrol, yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya
4. Media merupakan wadah yang semakin berperan menampilkan peristiwa kehidupan masyarakat, baik yang bertaraf nasional maupun internasional.
5. Media sering kali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan,bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol,tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup,dan norma-norma.

6. Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif.

Media sebagai pengontrol tentunya memiliki peran dalam mengiring opini publik dalam menggambarkan suatu peristiwa, baik berupa sosial dan politik adapunketerkaitan media massa dengan akses informasi publik terhadap berita tentang pemilihan umum, yang dikemukakan oleh Alex Sobur (2016:160) yaitu:

1. Terbatasnya kemampuan analisis dan sikap kritis masyarakat pemilih terhadap figur kandidat dalam Pemilu.
2. Dominannya media umum khususnya media cetak lokal sebagai rujukan sikap dan keputusan pemilih dalam menentukan hasil Pemilu.
3. Krisis independensi media massa pemuat kegiatan Pilkada yang berpotensi mensitir sikap untuk hanya memilih figur tertentu yang notabene telah berkonsentrasi dengan pemilik media.

Dari penjelasan diatas di dapati bahwa media massa bukan hanya sebagai media menyampaikan informasi tetapi media juga berfungsi sebagai alat kontrol dalam suatu peristiwa, baik dalam kepentingan pemilik media ataupun kepentingan dalam pemilu. Notabennya media sebagai suatu industri hanya menyampaikan pesan propaganda, hiburan, informasi, nasihat tetapi sebagai sarananya ilmu pengetahuan.

## 2.2.3 Kajian Umum Pers

### 2.2.3.1 Pengertian Pers

Pengertian pers di batasi pada pengertian sempit dan pengertian luas, seperti dikemukakan oleh Oemar Seno Adji, pers dalam arti sempit seperti diketahui mengandung penyiaran – penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita – berita dengan jalan kata tertulis. Sedangkan dalam arti luas memasukan kedalamnya semua media *mass communications* memancarkan fikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata – kata tertulis maupun dengan kata – kata lisan (Suptohadi, 2011: 129).

Pers dalam UU Nomor 11 Tahun 1966 Tentang ketentuan – ketentuan pokok Pers Pasal 1 ayat 1

“Pers adalah lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum yang berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, dilengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat – alat milik sendiri berupa percetakan, alat – alat foto, klise, mesin – mesin stensil atau alat – alat teknik lainnya”.

Adapun pengertian Pers dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 1 ayat 1

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk

lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

Widodo berpendapat dikutip dalam (Subakti, 2015:77).fungsi Pers di tengah masyarakat ada macam – macam yakni:

**1. *To Infrom. (informasi)***

Pers mempunyai fungsi untuk memberi informasi atau kabar kepada masyarakat atau pembaca, melalui tulisan, siaran dan tayangan yang rutin kepada masyarakat pers memberikan informasi yang beraneka ragam.

**2. *To Edocate.(pendidik)***

Pers berfungsi sebagai pendidik, melalui berbagai macam tulisan atau pesan – pesan yang diberikannya, pers bisa mendidik masyarakat atau pembacanya.

**3. *To Controle (control)***

Pers ditengah – tengah masyarakat memberikan control sosial lewat kritik dan masukan yang bersifat membangun.Pemberitaan adanya penyimpangan dan tindakan melanggar peraturan yang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat atau pejabat merupakan wujud sumbangsi dalam mengontrol masyarakat dan aparat pemerintah.

**4. *To Bridge (penghubung)***

Pers mempunyai fungsi sebagai penghubung atau menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya.Aspirasi yang tidak dapat tersalurkan melalui jalur atau kelembagaan yang ada, bisa disampaikan lewat pers.

### 5. *To Entertain* (hiburan)

Pers bisa memberikan hiburan kepada masyarakat, menghibur disini bukan hanya dalam pengertian dalam hal – hal yang lucu saja tapi bisa dalam bentuk kepuasan dan kesenangan dari sugukan pers. (Subakti, 2015:77).

Mc. Luhan sebagai mana yang dikutip oleh Alex sabour (dalam Putra,2016:11) menjelaskan bahwa media secara umum adalah perpanjangan alat indra manusia. Dengan media manusia memperoleh informasi tentang benda, orang, dan tempat yang tidak dialami secara langsung. Mc Luhan bahkan menyebut bahwa *The medium is the message*. Artinya medium saja sudah menjadi pesan, atau yang mempengaruhi khlayak bukan apa yang disampaikan oleh media.

Lois W. Hodges dalam (Tamburaka,2013:155)*Responsible Journalism* lebih lanjut mengatakan ada tiga katagori tanggung jawab yang bisa diterapkan dalam dunia pers.

1. Tanggung jawab yang di dasarkan pada penugasan (*Assigned Responsibilities*). Pers yang hubungan antara atasan dan bawahan, majikan dan karyawan. Penguasa dapat mendikte pers dengan larangan atau perusahaan media yang menugaskan mereka, pers disini tidak bebas memilih karena diintervensi.
2. Tanggung jawab berdasarkan kontrak (*Contracted Responsibilities*). Terdapat hubungan antara pihak yang sama – sama berbagi kekuasaan dan wewenang mereka diikat oleh suatu kontrak baik formal (tertulis/dokumen) atau informal (lisan/tidak tertulis). Wartawan bertanggung jawab secara perusahaan media secara eksplisit, baik

perusahaan media dan wartawan berada dalam perjanjian dengan *audience* untuk memberikan pelayanan.

3. Tanggung jawab yang timbul dari diri sendiri (*Self-imposed Responsibilities*). Sudah membangun dalam jiwa mereka, naluri atau berbuat baik dengan hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada orang lain. Mereka melihat sebagai suatu panggilan.

### **2.2.3.2 Wartawan dan Kode Etik Jurnalistik**

Wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan dan atau tugas – tugas jurnalistik secara rutin, atau dalam definisi lain, wartawan dapat dikatakan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di media massa, baik media cetak, media elektronik maupun media *online*. Ada banyak istilah yang digunakan untuk menyebut seorang bekerja sebagai wartawan, antara lain: pemburu berita, pewarta, jurnalis, reporter, newsgetter, pressman, kuli tinta dan nyamuk pers. (Yunus,2015:38)

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pers dalam Bab 1. Pasal 1 ayat 3 dan 4 yang berbunyi:

- (3). Kewartawanan ialah pekerjaan/kegiatan/usaha yang sah berhubung dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar – gambar dan lain – lain sebagainya untuk perusahaan pers, radio televisi dan film.

- (4). Wartawan ialah karyawan yang melakukan pekerjaan kewartawanan seperti yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini secara kontinu.

Wartawan sering dikatakan sebagai “Roh – nya Jurnalistik” tentunya wartawan harus memiliki kompetensi, standar kompetensi wartawan merupakan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan.

Tujuan Standar Kompetensi Wartawan dikutip dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 Tentang Standar Kompetensi Wartawan Dewan Pers tertuang sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan
2. Menjaga Harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual
3. Menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers
4. Menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers
5. Menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan.
6. Menegakan Kemerdekaan Pers

Adapun kompetensi wartawan yang dirumuskan oleh Dewan Pers adalah sebagai berikut:

**1. Kesadaran (*awareness*)**

Dalam melaksanakan pekerjaan wartawan dituntut menyadari norma – norma etika dan ketentuan hukum. Garis besar kompetensi kesadaran wartawan yang diperlukan bagi peningkatan kerja dan profesionalisme wartawan adalah:

- a. Kesadaran Etika dan hukum
- b. Kepekaan Jurnalistik
- c. Jejaring dan Lobi

**2. Pengatahuan (*Knowledge*)**

Wartawan di tuntut untuk memiliki teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum, serta pengetahuan khusus. Wartawan juga perlu mengetahui berbagai perkembangan informasi pada bidangnya:

- a. Pengatahuan umum
- b. Pengatahuan khusus
- c. Pengatahuan teori dan prinsip jurnalistik

**3. Keterampilan (*skills*)**

Wartawan mutlak menguasai keterampilan jurnalistik seperti teknik menulis, teknik wawancara dan teknik menyunting. Selain itu, wartawan juga harus mampu melakukan riset, investigasi, analisis, dan penentuan arah pemberitaan serta terampil menggunakan alat kerjanya termasuk teknologi informasi. Meliputi:

- a. Keterampilan peliputan
- b. Keterampilan menggunakan alat dan teknologi informasi
- c. Keterampilan riset dan investigasi
- d. Keterampilan analisis dan arah pemberitaan

Disisi lain, Carl Warren dalam buku *Modern News Reporting* yang dikutip dalam Yunus,2015:43 menegaskan perlunya wartawan memiliki 10 prinsip dasar menjalankan tugasnya, yaitu:

- Mampu memperhatikan dan mendengar
- Memiliki pergaulan yang luas
- Memiliki pengetahuan
- Rajin membaca dan kritis
- Memiliki inisiatif dan sanggup
- Rajin bekerja dan sabar
- Menggunakan pikiran, tidak palsu
- Menulis, menulis dan menulis
- Berpikir jelas dan tepat
- Mampu memanfaatkan waktu

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan profesionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai jurnalis dalam memberikan fakta yang sebenarnya.

Nicholas Andrei (dalam Sari, 2012:132) Etika jurnalistik adalah standar aturan perilaku dan moral yang mengikat para jurnalis dalam melaksanakan pekerjaannya. Etika jurnalistik ini tidak hanya untuk memelihara dan menjaga standar kualitas pekerja si jurnalis bersangkutan, tetapi juga untuk melindungi atau menghindarkan khalayak dari kemungkinan dampak dari tindakan atau perilaku dari si jurnalis bersangkutan.

Adapun Dewan Pers Indonesia di kutip (dalam Samsuri, 2013:291) wartawan Indonesia menetapkan dan menaati kode Etik Jurnalistik sebagai berikut:

1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk
2. Wartawan Indonesia menempuh cara – cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik
3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah
4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul
5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebut identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan
6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap
7. Wartawan Indonesia memiliki hak total untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya,

menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan

8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau deskrimasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, cacat jiwa, atau cacat jasmani
9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik
10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa
11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional.

Dengan prinsip tersebut wartawan diharapkan dapat mencapai spesialisasi dalam pekerjaan jurnalistiknya, wartawan sebagai rohnya jurnalistik dalam menyajikan berita yang objektif dengan hal ini pula menjadi acuan dalam penetapan mekanisme kerja redaksi suatu media, dan dijadikan sebagai komposisi rubrik dan isi pemberitaan yang disajikan oleh media massa.

Adapun nilai – nilai kode etik jurnalistik yaitu (Pasrah, 2008:123-129) yaitu:

1. *Fainess*( bersikap wajar dan patut)

Dalam penyampaian informasi seorang jurnalis tidak bias lepas dari unsur kepatutan, misalnya menerapkan etika kejujuran, kebenaran dan keadilan atau tidak memihak dengan menulis berita secara berimbang. Aspek

kejujuran dalam jurnalistik merupakan etika yang didasarkan kepada data dan fakta.

2. Kebebasan pertanggung jawab

Setiap manusia diberi kebebasan untuk berbuat apa saja, tapi harus bertanggung jawab terhadap norma – norma yang berlaku. Pers bebas menyiarkan sesuatu tetapi harus mempertanggung jawab apa yang disiarkannya.

3. *Accuracy*( keakuratan informasi)

Agar dapat menyampaikan berita secara benar, valid dan akurat seorang jurnalis harus berani menelusuri keberbagai sumber berita hingga dihasilkan informasi yang dapat dipercaya

4. Kritik – Konstruktif

Dengan kevalitan yang dimilikinya pers paling tidak menghentikan penyimpangan informasi agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar. Cara pers menyampaikan kritik – konstruktif bisa bermacam – macam bentuknya, kadang ia menulis dalam bentuk tajuk rencana, komentar, ulasan, kritikan dan kadang berbentuk pembeberan penyimpangan dalam bentuk laporan atau penulisan berita.

## 2.2.4 Definisi Surat Kabar

### 2.2.4.1 Surat kabar

Surat kabar sebagai pemberi informasi adalah media massa yang pertama kali digunakan dibandingkan dengan jenis media massa lainnya. Surat kabar pertama kali diterbitkan dan diperjual belikan untuk pertama kali di Amerika Serikat. Menurut sejarahnya surat kabar ditemukan dan di cetak pertama oleh seorang imigran dari Inggris pada tahun 1690, bernama Benyamin Harris (Djuroto, 2002 :5)

Di Indonesia sendiri surat kabar yang pertama diterbitkan di Jakarta pada tahun 1828 oleh *Javasche Courant* yang isinya memuat berita-berita resmi pemerintah jajahan Belanda, berita lelang dan berita kutipan dari harian Eropa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa surat kabar merupakan lembaran-lembaran kertas yang bertuliskan kabar atau berita yang berbagi-bagi atas kolom-kolom, terbit setiap hari atau secara periodik.

Menurut Djuroto (2002:11) surat kabar merupakan kumpulan dari berita, artikel, cerita, iklan, dan sebagainya yang dicetak kedalam lembaran kertas ukuran plano yang diterbitkan secara teratur, dan bisa terbit setiap hari atau seminggu satu kali. Adapun menurut Meinanda (dalam Nurinun, 2017:26) mengemukakan bahwa surat kabar harus pula memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1. Publisitas merupakan publikasi yang dilakukan surat kabar harus terbuka untuk siapa saja atau untuk umum dan mencapai kebebasan publik di berbagai tempat.

2. Periodesitas merupakan penerbitan surat kabar yang harus teratur dan harus sesuai dengan jadwal penerbitan. Dalam artian bahwa waktu terbit tiap edisinya adalah tetap dan berkelanjutan.
3. Universalitas merupakan dalam isi surat kabar meliputi semua persoalan, tidak tertentu saja. Dalam menjangkau informasi yang termuat di surat kabar bersifat umum dan dapat diterima oleh semua kalangan dan deretan masyarakat.
4. Aktualitas merupakan isi beritanya selalu baru sehingga menampilkan peristiwa yang sedang terjadi, kejadian informasi yang paling baru dan dapat menambah pengetahuan.
5. Kontinuitas merupakan dalam isi berita dan isi surat kabar akan selalu berkesinambungan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan pendapat diatas, Ermanto (dalam Istiqomah 2012: 16) menyatakan bahwa surat kabar sebagai salah satu bentuk dari media massa memiliki enam fungsi utama yaitu:

1. Memberi informasi
2. Mendidik
3. Menyalurkan aspirasi masyarakat
4. Membentuk pendapat umum
5. Melakukan control sosial
6. Memberikan hiburan

Surat kabar pada perkembangan saat ini menjelma sebagai salah satu bentuk dari pers yang mempunyai kekuatan dan kewenangan untuk menjadi sebuah control sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut disebabkan karena filsafah pers yang selalu identik dengan kehidupan sosial, budaya, dan politik

#### **2.2.4.2 Agenda Setting media**

##### **a. Teori Agenda Setting**

Maxwell E. McCombs dan Donald L. Show dalam Nuruddin (2007:195) percaya bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mentransfer hal yang menonjol yang dimiliki sebuah berita dari *news agenda* mereka kepada publik agenda. Pada saatnya media mampu membuat apa yang penting menurutnya menjadi penting pula bagi masyarakat.

Adapaun Stephan W. Littlejohn dan Karren A. Foss (2009:416) mengemukakan bahwa *agenda setting theory* adalah teori yang menyatakan bahwa media membentuk gambaran atau isu yang penting dalam pikiran. Hal ini terjadi karena media harus selektif dalam melaporkan berita. Saluran berita sebagai penjaga gerbang informasi membuat pilihan tentang apa yang harus dilaporkan dan bagaimana melaporkannya. Apa yang masyarakat ketahui pada waktu tertentu merupakan hasil dari penjagaan gerbang oleh media.

Berdasarkan pengertian diatas, agenda setting membicarakan bagaimana media berperan dalam membentuk agenda di tengah masyarakat melalui sebuah berita yang diterbitkan atau disiarkan, yang menjadi perbincangan ditengah masyarakat, baik berupa edukasi, hiburan atau kepentingan – kepentingan dari

sebagian orang dalam menunjang durabilitas kelompok maupun individu yang dimana menjadi opini ditengah masyarakat.

Adapun agenda yang dapat ditentukan oleh media massa seperti yang dikutip Kholil dalam Simbolika (2018:36) adalah:

- a. Apa yang harus dipikirkan oleh masyarakat
- b. Menentukan fakta yang harus dipercayai oleh masyarakat
- c. Menentukan penyelesaian terhadap suatu masalah
- d. Menentukan tumpuan perhatian terhadap suatu masalah
- e. Menentukan apa yang perlu diketahui dan dilakukan oleh masyarakat

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan agenda setting adalah bagaimana membentuk opini public terhadap satu persoalan sehingga persoalan tersebut dianggap suatu permasalahan penting bagi masyarakat luas termaksud bagi pemerintah. Dengan terbentuknya opini publik maka hal ini mendorong lahirnya kebijakan publik atau *Output* di harapkan dari orang yang merancang setting tersebut (Dede Sri Kartini. 2016:71).

#### **b. Pembentukan Agenda Setting**

Proses penyusunan agenda kebijakan (*policy agenda*) menurut aderson yang dikutip Joko Widodo (2009:53). Bahwa secara berututan terdiri dari beberapa tahap diantaranya:

- a. *Privat Problems*, penyusunan agenda kebijakan diawali dari suatu masalah yang muncul dimasyarakat, akan tetapi masalah tersebut diartikan sebagai suatu masalah yang mempunyai akabat yang terbatas atau hanya

menyangkut suatu atau hanya menyangkut suatu atau sejumlah kecil orang yang terlibat secara langsung.

- b. *Public problem*, ketika masalah yang ada di masyarakat yang pada mulanya hanya sebagai *privat problem* terus bergulir dan melibatkan banyak orang, maka tahap selanjutnya berubah berubah menjadi *Public problem* diartikan sebagai suatu masalah yang mempunyai akibat – akibat mengenai orang – orang yang terlibat secara tidak langsung
- c. *Issiu*, diartikan sebagai perbedaan – perbedaan pendapat yang ada di masyarakat tentang persepsi dan solusi terhadap suatu masalah politik
- d. *Systemic agenda*, didefinisikan sebagai semua isu yang pada umumnya dirasakan oleh para anggota masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik dan isu tersebut memang berada dalam yurisdiksi kewenangan pemerintah.
- e. *Instituonal agenda*, didefinisiakan sebagai serangkaian masalah yang secara tegas membutuhkan pertimbangan – pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat keputusan.

#### **2.2.4.3 Persfektip Berita**

The New Glorier Webster International Dictionary dalam Purnama Kusumaningrat Hikmat (2008) berita adalah:

- a. Informasi hangat tentang suatu yang telah terjadi, atau tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya.
- b. Berita adalah informasi yang disajikan oleh media semisal surat kabar, radio dan televise

- c. Berita adalah sesuatu atau seseorang yang dipandang oleh media merupakan subjek yang layak untuk diberitakan

Adapun menurut Mitchel V.Charnley dalam Mohammad Sinung Restendy (2016 : 3) mengemukakan berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting dan menarik bagi sebagian besar pembaca serta menyangkut kepentingan mereka. Dan disebutkan juga berita merupakan suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian pembaca surat kabar yang memuat hal tersebut.

Suatu berita dapat dikatakan layak apabila didalamnya mengandung unsur kejelasan tentang kejadian atau peristiwa, adapun penentu Nilai dari sebuah berita yang dikemukakan oleh Asep Syamsul Romli (2003:37) sebagai berikut:

1. Aktualitas, peristiwa terbaru, terkini, terhangat (*up to date*), sedang atau baru saja terjadi
2. Faktual, yakni ada faktanya benar – benar terjadi dan bukan fiksi (rekaan, khayalan, atau karangan). Fakta muncul dari kejadian nyata, pendapat, dan pernyataan
3. Penting, besar kecilnya dampak peristiwa pada masyarakat artinya peristiwa itu menyangkut kepentingan banyak atau berdampak pada masyarakat
4. Menarik, artinya memunculkan rasa ingin tahu dan minat pembaca, disamping actual dan faktual dan penting juga bersifat:

- Menghibur, artinya peristiwa lucu atau mengandung unsur humor
- Mengandung keganjilan, peristiwa atau keanehan
- Kedekatan, peristiwa baik berupa geografis maupun emosional
- Human interest, terkandung unsur empati, simpati atau mengunggah perasaan khalayak
- Konflik, pertentangan dan ketegangan

## **2.2.5 Sosialisasi Politik**

### **2.2.5.1 Pengertian Sosialisasi Politik**

Sosialisasi politik merupakan bagian yang penting dari suatu sistem politik karena dengan adanya sosialisasi politik maka seorang individu dapat mempelajari politik baik secara disadari ataupun tidak disadari oleh masing-masing individu tersebut. Proses sosialisasi dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya yang diperoleh individu dalam kehidupan, hal tersebut sejalan dengan pendapat Berger (dalam Djuyandi, 2014:1204) bahwa sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat. Dalam suatu proses politik, sosialisasi politik terdapat keterlibatan individu-individu sampai dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi dalam sebuah proses politik.

Sedangkan menurut Djuyandi (2004: 1205) sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik dengan demikian juga

menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya

Pengertian sosialisasi politik menurut Heryanto (2018:12) merupakan proses yang berdimensi politik, sehingga politik bisa dimaknai sebagai sebuah pengetahuan, nilai, bahkan keretampilan. Pada dasarnya penyebaran informasi mengenai nilai-nilai dan norma-norma adalah inti dari sosialisasi yang dilakukan oleh badan-badan atau kelompok kepentingan untuk menanamkan nilai-nilai, sikap-sikap dan pengetahuan pada objek sosialisasi.

Definisi yang hampir serupa juga diungkapkan pula oleh Sigel (dalam Heryanto 2018: 14-15) yakni sosialisasi politik adalah proses pembelajaran secara gradual tentang norma, sikap, dan perilaku yang diterima dan dipraktikkan dalam sistem politik yang tengah berlangsung. Sigel menyatakan bahwa tujuan sosialisasi politik adalah melatih dan mengembangkan individu supaya menjadi anggota masyarakat politik yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan sosialisasi politik adalah proses dimana seseorang dapat mengetahui pengetahuan politik dari lingkungannya yang diperoleh dari individu atau kelompok lain baik secara disadari ataupun tidak disadari terutama yang terjadi saat seseorang tersebut belum dewasa sehingga menimbulkan sikap dan orientasi politik tertentu dalam kaitannya dengan kehidupan politik yang berlangsung.

### **2.2.5.2 Jenis-Jenis Sosialisasi Politik**

Terdapat berbagai jenis sosialisasi politik, dan apabila dikaitkan dengan prosesnya sosialisasi menurut Susanto (dalam Djuyandi 2014: 1206) dapat dibagi kedalam dua jenis, yaitu:

1. Sosialisasi primer, sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi ini berlangsung pada saat kanak-kanak.
2. Sosialisasi sekunder, adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu tertentu, bersama-sama menjalani proses kehidupan, dan diatur secara formal.

### **2.2.5.3 Isi sosialisasi politik**

Efriza (2012:54) menyatakan bahwa isi sosialisasi politik yang disampaikan oleh seseorang individu atau agen sosialisasi kepada individu atau kelompok masyarakat sebagai berikut:

- a. Informasi Politik

Informasi politik isi sosialisasi yang memberikan penerangan tentang terjadinya suatu peristiwa politik yang pernah terjadi

b. Pemberian keyakinan dan kepercayaan politik

Agen sosialisasi akan begitu kerasnya memaksakan kehendak, cita – cita, firasat atau ideologi politiknya. Biasanya berlangsung dalam suatu indoktrinasi dan hanya satu arah saja.

c. Pengatahuan politik

Pengatahuan politik sangat terkait dengan pemahaman akademis terhadap fenomena politik, artinya fenomena politik di berikan secara struktur dalam bentuk kurikulum pendidikan

d. Provokasi atau Propaganda politik

Provokasi, agitasi atau propaganda sebenarnya adalah tindakan penyalahgunaan etika berpolitik. Isi sosialisasi politik seperti ini memiliki kecenderungan untuk memutar balikan fakta yang sesungguhnya demi kepentingan provokator atau agitator.

#### **2.2.5.4. Jenis Sosialisasi Politik**

Ramlan Subakti menyatakan dalam Zuhri (2010:35) sosialisasi politik dibagi menjadi dua yaitu pendidikan politik dan Indoktrinasi politik yaitu:

a. Pendidikan politik

Merupakan suatu proses dialogik antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai – nilai, norma – norma dan simbol – simbol politik dalam pendidikannya, pendidikan politik dipandang sebagai proses dialog antara pendidik, seperti sekolah, pemerintah, partai politik, pesertadidik

dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pengalaman yang dianggap baik.

b. Indoktrinasi politik

Merupakan proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik.

### **2.2.5.5 Tujuan Sosialisasi Politik**

Rahman (2007:246) berpendapat tujuan dari sosialisasi politik adalah untuk menumbuh kembangkan serta menguatkan sikap politik dikalangan masyarakat secara umum atau bagian – bagian dari penduduk, melatih rakyat untuk menjalankan peranan – peranan politik, administratif.

Adapun Stiadi dan Kolip (2013) mengemukakan tujuan dari sosialisasi politik:

- a. Sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar, belajar dari pengalaman atau pola – pola interaksi
- b. Memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok dalam batas – batas yang luas
- c. Sosialisasi itu berlangsung sepanjang hidup
- d. Sosialisasi politik merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktifitas sosial baik secara implisit maupun eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial tersebut.

Michel Rush dan Philip Althof (2003) mengemukakan bahwa fungsi sosialisasi politik yakni melatih individu dalam memasukan nilai – nilai politik yang berlaku didalam sebuah system politik dan memelihara system politik dengan pemerintahan yang resmi. Sosialisasi politik sesuai tujuannya dapat disimpulkan bahwa suatu tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dari nilai – nilai politik itu sendiri yang sesuai dengan demokrasi itu sendiri.

#### **2.2.5.6 Faktor Keberhasilan Sosialisasi Politik**

Rush dan Philip (2007:37) berpendapat bahwa setiap keberhasilan suatu proses sosialisasi politik ditentukan oleh faktor lingkungan dan keterkaitan unsur– unsur yang mempengaruhinya. Proses keberhasilan sosialisasi politik ditentukan oleh:

1. Agen sosialisasi politik, yang terdiri dari keluarga, pendidikan, media massa, kelompok sebaya, kelompok kerja dan kelompok agama. Selain itu keberadaan kelompok kepentingan dan organisasi kemasyarakatan member pengaruh sebagai agen sosialisasi politik terhadap partisipasi masyarakat. Materi sosialisasi politik, yaitu pengetahuan, nilai – nilai dan sikap politik yang hidup dimasyarakat.
2. Mekanisisme sosialisasi politik, dibagi mnjadi 3 yaitu, imitasi, instruksi dan motivasi. Pola sosialisasi politik proses yang terus berkesinambungan untuk mengetahui proses sosialisasi yang terdiri dari bahan atau instansi yang melakukan proses sosialisasi hubungan antara

badan dan instansi tersebut dalam melakukan proses sosialisasi diantaranya:

- a. Imitasi, yaitu proses sosialisasi melalui peniruan terhadap perilaku yang ditampilkan individu - individu lain, dan merupakan hal yang amat penting dalam sosialisasi
- b. Intruksi, mengacu pada proses sosialisasi melalui proses pembelajaran baik secara formal (di sekolah), informal (pendidikan di keluarga), maupun dalam bentuk nonformal (diskusi-diskusi kelompok, organisasi, dll)
- c. Motivasi, merupakan mekanisme proses sosialisasi yang dikaitkan dengan pengalaman individu pada umumnya yang secara langsung mendorong dirinya untuk belajar dari pengalaman – pengalamannya mengenai tindakan – tindakan yang sesuai dengan sikap – sikap dan pendapatnya sendiri.

Selain itu Susanto (2000:45) menjelaskan faktor – faktor lain yang mempengaruhi sosialisasi politik diantaranya:

1. Apa yang disosialisasikan, merupakan bentuk informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma dan peran
2. Bagaimana cara mensosialisasikan, melibatkan proses pembelajaran.
3. Siapa yang mensosialisasikan, institusi, media massa, individu dan kelompok.

Agen sosialisasi merupakan peran utama dalam keberhasilan proses sosialisasi untuk menyebarkan atau menanamkan nilai – nilai dan norma – norma

yang terletak dalam materi sosialisasi. Keberhasilan dapat ditentukan oleh proses sosialisasi yang baik dan informasi dapat terus disalurkan kepada tujuan dari sosialisasi tersebut.

## **2.2.6 Definisi Pendidikan Politik**

### **2.2.6.1 Pendidik Pendidikan**

Pendidikan politik dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai *political socialization*. Pendidikan politik merupakan faktor penting bagi terbentuknya sikap politik warga negara yang akan mendukung berfungsinya sistem pemerintah yang sehat. Istilah pendidikan politik dalam beberapa literatur dijumpai sebagai *political education*. Menurut Ramlan Surbakti (2007:117), pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik di antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negara dari berbagai pihak dalam sistem politik, seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

Kantaprawira (2004:55) berpendapat bahwa pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi dan dapat melatih warganegara agar meningkat partisipasi politiknya. Dari beberapa pendapat para ahli dapat diambil suatu kesimpulan mengenai definisi pendidikan politik, bahwa pendidikan politik dapat dipahami sebagai salah satu fungsi politik yang ditunaikan oleh struktur politik masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai, symbol simbol, keyakinan-keyakinan, pandangan-

pandangan tentang sistem politik melalui proses dialogik, terbuka, kritis, rasional atau penyadaran. Dengan adanya pendidikan politik tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara.

#### **2.2.6.2 Fungsi Pendidikan Politik**

Pendidikan politik memilih fungsi dan tujuan yang krusial, dimana pendidikan politik akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang proses politik sehingga tercapainya kesadaran politik secara maksimal dalam suatu sistem politik. Menurut Nurcholis (2018:21-22) pendidikan politik mempunyai fungsi utama, yaitu (1) Fungsi untuk mengubah dan membentuk tata perilaku seseorang agar sesuai dengan tujuan politik yang dapat menjadikan setiap individu sebagai partisipan politik yang bertanggung jawab, dan (2) Fungsi pendidikan politik dalam arti yang lebih luas untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang sesuai dengan tuntunan politik yang ingin diterapkan. Esensi pendidikan politik adalah mengenai bagaimana masyarakat mendapat sosialisasi politik, Sosialisasi politik secara fungsi akan mendorong masyarakat mengerti akan peranan dalam sistem politik.

## **2.2.7 Pemilihan Umum**

### **2.2.7.1 Pengertian Pemilihan Umum**

Pemilihan umum merupakan proses pemilihan untuk mengisi jabatan – jabatan politik tertentu. Pemilihan umum juga merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif dengan melakukan kegiatan *retririka*, *publick relations*, komunikasi massa, lobby dan kegiatan lainnya. Menurut Haris (2006:10) pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, masal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Adapun Rahman (2002:194) menyatakan pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil – wakilnya yang akan duduk dalam dewan perwakilan rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat system pemilihan umum.

Pada pasal 1 Nomor 1 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Menurut Bodiarjo (2006) fungsi pemilihan umum yaitu:

1. Mempertahankan dan mengembangkan sendi – sendi demokrasi di Indonesia
2. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia)

3. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru yaitu tetap tegakan pancasila dan dipertahankannya UUD RI Tahun 1945.

Oleh karena itu pemilihan umum bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib, melaksanakan kedaulatan rakyat, dan melaksanakan hak – hak asasi warga Negara, Dengan demikian, pemilu pada hakikatnya merupakan suatu proses pemilihan untuk memilih orang – orang yang akan menduduki kursi pemerintahan yang dimana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.

#### **2.2.7.2 Pengertian Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)**

Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau sering disebut Pilkada atau pemilukada adalah bagian dari implemtasi demokrasi. Kepala daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menyelenggarakan lajunya roda pemerintahan. Dalam pasal 1 peraturan Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 3 tahun 2016 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 menjelaskan bahwa PILKADA adalah kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi dan Labupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Adapun UU RI Nomor 32 Tahun 2004 pasal (25), tugas dan wewenang serta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Mengajukan rencana Peraturan Daerah (PERDA)
3. Menetapkan PERDA yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan PERDA tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
5. Mengupayakan terlaksanakannya kewajiban daerah;
6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang – undangan; dan
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah adalah merupakan ajang untuk memilih pemimpin di suatu wilayah baik berupa Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan menjadi pemimpin di wilayah tersebut, oleh karena itu pemimpin yang dipilih haruslah berkualitas dan mampu memberikan perubahan yang lebih baik kepada masyarakatnya.

### **2.2.7.3 Asas Pemilihan Umum**

Pelaksanaan pemilu di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas dan rahasia. Asas luber sudah ada sejak orde baru kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang

merupakan singkatan dari jujur dan adil. Adapun yang dimaksud dengan asas Luber dan Jurdil dalam pemilu menurut undang – undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, asas pemilu meliputi (Frenki 2016:57-58) :

- a. Langsung artinya rakyat mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nurani tanpa perantara.
- b. Umum artinya semua warga Negara yang sudah berumur 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut pemilihan dengan tanpa adanya deskriminasi
- c. Bebas, artinya rakyat berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa ada pengaruh atau paksaan dari siapapun
- d. Rahasia, rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun
- e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termaksud pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersifat jujur sesuai dengan peraturan perundang – undangan
- f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang samaserta bebas dari kecurangan.

## 2.2.8 Kerangka Berfikir

Setiap penelitian pasti diperlukan adanya kerangka berpikir sebagai pijakan atau sebagai pedoman dalam menentukan arah dari penelitian, hal ini diperlukan agar penelitian tetap berfokus pada kajian yang akan diteliti. Alur kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

**Gambar 2.2.8 Kerangka Berfikir Peneliti**



### 2.2.8.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual yaitu sautu definisi yang berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walupun secara intuitif masih bisa di pahami maksudnya (Azwar,2007:72). Dengan demikian untuk memudahkan dan menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti akan memilih teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yang sesuai dengan kerangka teori peneliti. Maka beberapa teori konseptual yang berhubungan dalam proposal ini adalah:

## 1. Peran

Riyadi (2002:138) berpendapat peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma – norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dan terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan pendukung fungsinya dalam mengorganisasi.

## 2. Sosialisasi Politik

Rush dan Philip (2007:37) berpendapat bahwa setiap keberhasilan suatu proses sosialisasi politik ditentukan oleh faktor lingkungan dan keterkaitan unsur-unsur yang mempengaruhinya. Proses keberhasilan sosialisasi politik ditentukan oleh:

3. Agen sosialisasi politik, yang terdiri dari keluarga, pendidikan, media massa, kelompok sebaya, kelompok kerja dan kelompok agama. Selain itu keberadaan kelompok kepentingan dan organisasi kemasyarakatan member pengaruh sebagai agen sosialisasi politik terhadap partisipasi masyarakat. Materi sosialisasi politik, yaitu pengetahuan, nilai – nilai dan sikap politik yang hidup dimasyarakat.

4. Mekanisisme sosialisasi politik, dibagi mnjadi 3 yaitu, imitasi, instruksi dan motivasi. Pola sosialisasi politik proses yang terus berkesinambungan untuk mengetahui proses sosialisasi yang terdiri dari

bahan atau instansi yang melakukan proses sosialisasi hubungan antara badan dan instansi tersebut dalam melakukan proses sosialisasi diantaranya:

- d. Imitasi, yaitu proses sosialisasi melalui peniruan terhadap perilaku yang ditampilkan individu - individu lain, dan merupakan hal yang amat penting dalam sosialisasi
- e. Intruksi, mengacu pada proses sosialisasi melalui proses pembelajaran baik secara formal (di sekolah), informal (pendidikan di keluarga), maupun dalam bentuk nonformal (diskusi-diskusi kelompok, organisasi, dll)
- f. Motivasi, merupakan mekanisme proses sosialisasi yang dikaitkan dengan pengalaman individu pada umumnya yang secara langsung mendorong dirinya untuk belajar dari pengalaman – pengalamannya mengenai tindakan – tindakan yang sesuai dengan sikap – sikap dan pendapatnya sendiri.

#### **2.2.8.2 Definisi Operasional**

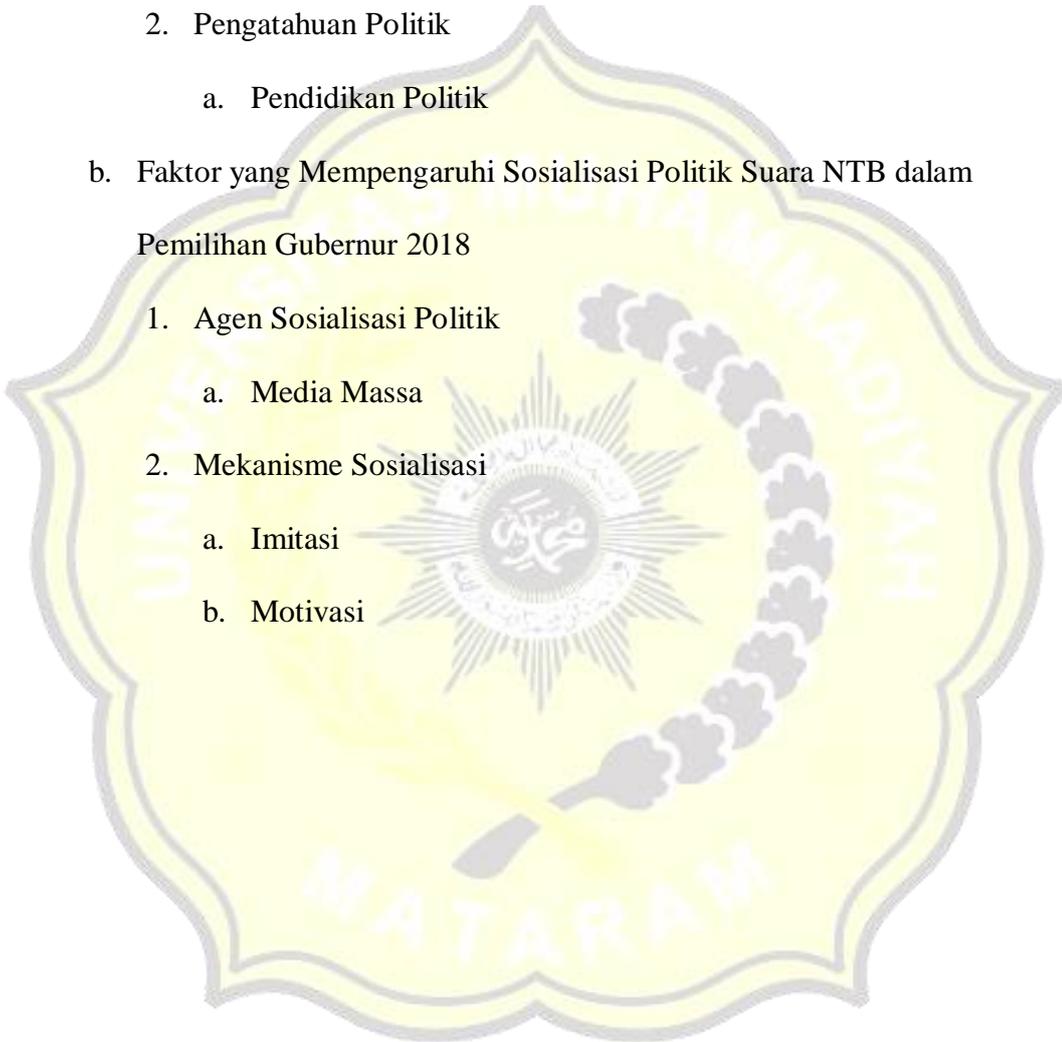
Definisi Operasional adalah informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama, selain itu definisi operasional juga sebagai aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara mengukur variabel adapun definisi operasional peneliti sebagai berikut:

a. Aspek Peran Suara NTB dalam Sosialisai Politik pemilihan Gubernur  
2018

1. Informasi Politik
  - a. Target Sosialisasi
  - b. Jangkauan dan Sebaran Sosialisasi
2. Pengatahuan Politik
  - a. Pendidikan Politik

b. Faktor yang Mempengaruhi Sosialisasi Politik Suara NTB dalam  
Pemilihan Gubernur 2018

1. Agen Sosialisasi Politik
  - a. Media Massa
2. Mekanisme Sosialisasi
  - a. Imitasi
  - b. Motivasi



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif, Ghony & Fauzan (2016:25) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantitatif. Penelitian ini berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dengan situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Pada penelitian kualitatif terdapat beberapa pendekatan yang digunakan, pendekatan tersebut yaitu pendekatan deskriptif. Menurut Nazir dalam Prastowo, (2016: 186) pendekatan diskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Ahli lain menegaskan bahwa penelitian diskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan.

Berdasarkan pandangan di atas, maka penelitian kualitatif dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu peneliti langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan mengenai peran Media Massa dalam Pendidikan Politik Melalui Sosialisasi Politik Surat Kabar Suara NTB (Studi Kasus Pemberitaan Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat 2018).

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di laksanakan dikota Mataram tepatnya di kantor Perwakilan Bali Post NTB Harian Umum Suara NTB yang terletak di jalan Bangau No.15 Cakranegara Kota Mataram. Harian Suara NTB merupakan surat kabar Indonesia yang terbit dan berisi seputar berita-berita di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Penelitian ini berjudul “Peran Media Massa dalam Pendidikan Politik Melalui Sosialisasi Politik Surat Kabar Suara NTB (Studi Kasus Pemberitaan Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat 2018)” oleh karena itu penelitian ini akan di fokuskan pada bentuk sosialisasi surat kabar Suara NTB dalam Pemberitaan Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat 2018.

### **3.3 Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaannya diteliti (Sukandarrumidi, 2002:65). Informan yang akan peneliti wawancarai ialah Pimpinan umum Suara NTB, individu-individu yang berkaitan dengan fokus penelitian seperti pimpinan redaksi, redaktur pelaksana, dan lain sebagainya yang dianggap mengetahui informasi yang dibutuhkan dalam penelitian

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2014:62). Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### 1. Teknik Observasi

Teknik observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Usman & Purnomo, 2017:90). Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, perilaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan yang relevan dengan data-data yang dibutuhkan peneliti. Dalam penelitian ini, teknik observasi digunakan untuk mengetahui sosialisasi politik melalui peran media massa surat kabar Suara NTB.

#### 2. Teknik Wawancara

Wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan teknik ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi apa yang tersembunyi jauh didalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas

waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa kini, dan masa mendatang.

Jenis wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara, yaitu wawancara yang digunakan berpegang pada pedoman pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Didalam pedoman tersebut telah tersusun secara sistematis hal-hal yang akan ditanyakan.

### 3. Teknis Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun file baik itu berupa foto-foto pada saat peneliti melakukan penelitian tersebut. teknik ini dilakukan untuk memperoleh data tentang pemberitaan-pemberitaan surat kabar suara NTB, struktur organisasi, proses-proses pembuatan berita dan sebagainya yang berkaitan dengan sosialisasi politik surat kabar Suara NTB dalam Pemberitaan Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat 2018.

## 3.5 Sumber Data

### 1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yaitu para pihak yang dijadikan informan penelitian. Sumber data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai Peran Media Massa Dalam Pendidikan Politik Melalui Sosialisasi Politik Surat Kabar Suara NTB Studi Kasus Pemberitaan Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat 2018

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan berbagai teori dan informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Yaitu berbagai buku yang berisi teori atau dokumen mengenai Media Massa Dalam Pendidikan Politik data lain yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara untuk mengolah data setelah diperoleh hasil penelitian sehingga dapat diambil kesimpulan berdasarkan data yang factual. Miles dan Huberman 1984 dalam (Sugiyono, 2004 : 91), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam proses analisis interaktif terdapat 4 komponen harus dipahami oleh peneliti yaitu : (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) display data, dan (4) penarikan kesimpulan/verifikasi.

#### 1. Pengumpulan Data

Dalam analisis data langkah awal yang perlu dilakukan, peneliti harus mengumpulkan data yang diperoleh sebelum melakukan reduksi. Data yang di kumpulkan bisa data dari lapangan dan teori-teori yang berkaitan dengan tema yang diambil peneliti. Pada penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengumpulkan data secara mendetail di kantor Perwakilan Bali Post NTB Harian Umum Suara NTB.

## 2. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data yang dimaksudkan di sini ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi ini diharapkan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilah untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan.

## 3. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Dari penyajian data tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan mana data yang utama dan mana data pendukung.

## 4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan kegiatan akhir analisis data, penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Sedangkan verifikasi adalah kegiatan pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis selama peneliti mencatat,

atau suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman untuk mengembangkan kesempatan inter subjektif, dengan kata lain makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya (Moleong, 2004:15-20)

